

Pendidikan Politik Dan *Civic Culture* Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Alexsander Yandra *1, Elly Nielwaty², Dwi Herlinda³, Adrian Faridhi⁴

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Riau Indonesia

*e-mail: alexsy@unilak.ac.id, niel@gmail.com, dwiherlinda@unilak.ac.id,
adrianfaridhi@unilak.ac.id

Abstract

This service is an education of people's behavior to be smart in politics and the realization of democratic consolidation both at the national and local levels. With the above conditions, it is deemed necessary for the contribution of Unilak Higher Education to carry out service with the theme of inclusive political education and strengthening civic culture for the PKK community to fulfill their rights and obligations in politics. Through counseling and FGD methods, this service can encourage the creation of a community culture that is aware of ethical politics and encourages the realization of a civic culture from the community. This can be seen from the increase in public knowledge regarding political rights, both in voting and in supervising the election

Keywords: Political Education, Civic Culture, PKK

Abstrak

Pengabdian ini merupakan edukasi dari perilaku masyarakat agar cerdas dalam politik dan terwujudnya konsolidasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pengabdian dengan tema pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan civic culture bagi masyarakat Ibu PKK untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam politik. Melalui metode penyuluhan dan FGD maka pengabdian ini dapat mendorong terciptanya kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak politik baik dalam memilih maupun dalam mengawasi dalam pemilu tersebut.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Civic Culture, PKK

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks Pemilihan Umum partisipasi politik adalah unsur dasar bagi terlaksananya suatu demokrasi. Semakin besar jumlah peserta pemilih maka demokrasi seringkali dinyatakan sukses karena menunjukkan kemauan dan kesadaran berpolitik rakyat (Yandra:2016). Akan tetapi benarkah kuantitas jumlah peserta pemilih simetris dengan keberhasilan proses demokrasi (Susan,255:2010). Metode statistik ini tampaknya memerlukan pandangan berbeda yaitu dari sisi kualitas partisipasi politik. Pemilu menjadi wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Artinya pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pemilu yang dilaksanakan di tingkat lokal untuk memilih kepala daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang sepatutnya memerintah mereka dan ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik di tingkat lokal.

Penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas yang tinggi serta diikuti oleh

masyarakat yang cerdas politik ataupun entitas lainnya seperti perguruan tinggi sebagai *civil society*. Oleh karena itu pemerintah dan perguruan tinggi bisa bermitra untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, sehingga hak-hak politik masyarakat pada tingkat daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Fenomena yang menarik dari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) adalah fisibilitas keterlibatan masyarakat yang aktif dari berbagai entitas (Yandra:2017). Dimana setiap entitas masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam politik, sehingga diharuskan untuk ikut serta secara sadar tanpa dipaksa dalam momentum pilkada. Dinamika yang berlangsung ini sejalan dengan harapan pemerintah ketika menerbitkan UU pemerintah daerah harapan pemerintah daerah yaitu demokrasi harus dapat dilaksanakan dengan baik di aras lokal. Salah satu indikator terlaksananya demokrasi lokal terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Kada. Bahkan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses Pilkada, pemerintah semakin percaya dengan semakin tumbuhnya budaya politik partisipan sebagai bagian dari penguatan budaya kewargaan (*civic culture*) yang menjadi dasar proses demokrasi yang ingin dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahap III di Provinsi Riau akan dilaksanakan pada Juni 2018. Kecendrungan yang terjadi adalah para Ibu-Ibu apatis dan pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya khususnya di Kelurahan Muara Fajar Barat hal ini terlihat rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahap I dan II di Riau. Selanjutnya adanya pengelompokan entitas masyarakat seperti bagi Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara oposisional seharusnya mampu menjadi medium dalam memberikan pengaruh terhadap pilihan politik yang lebih bijak terhadap pemilih pemula. Selain itu, dinamika konstelasi politik dalam Pilkada secara tidak langsung telah membuka ruang partisipasi yang tinggi dari masyarakat secara kelompok. Hal ini jelas akan menimbulkan kelompok massa yang mengedepankan semangat entitasnya, sehingga secara tidak langsung terjadi polarisasi masyarakat yang hidup bersamaan dalam situasi sosial apapun. Dalam konteks politik dan kebangsaan perguruan tinggi dapat memainkan peran untuk mewujudkan “Gerakan Pemilih Cerdas” artinya mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya pemilih yang rasional untuk lahirnya pemimpin yang berkualitas dari pemilihan langsung yang sukses tanpa ada nya suara yang golput. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk kontribusinya dalam membentuk kesadaran berpolitik masyarakat di aras lokal dan membudayakan perilaku politik partisipan yang mengutamakan visi dan kredibilitas calon pemimpin yang di usung. Hal ini tidak mengartikan perguruan tinggi ikut politik praktis tetapi justru sebaliknya perguruan tinggi menciptakan politik etik yang ideologis di lingkungan masyarakat .

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau, Universitas Lancang Kuning (UNILAK) menyadari akan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi bangsa yaitu perilaku masyarakat yang cerdas dalam politik dan konsolidasi demokrasi segera terwujud baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan *civic culture* bagi masyarakat Ibu PKK untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam politik. Hal ini diharapkan dapat mencipatakan kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyarakat.

2. METODE

Kegiatan pra pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan bimbingan (pendampingan). Diskusi Kelompok Terarah

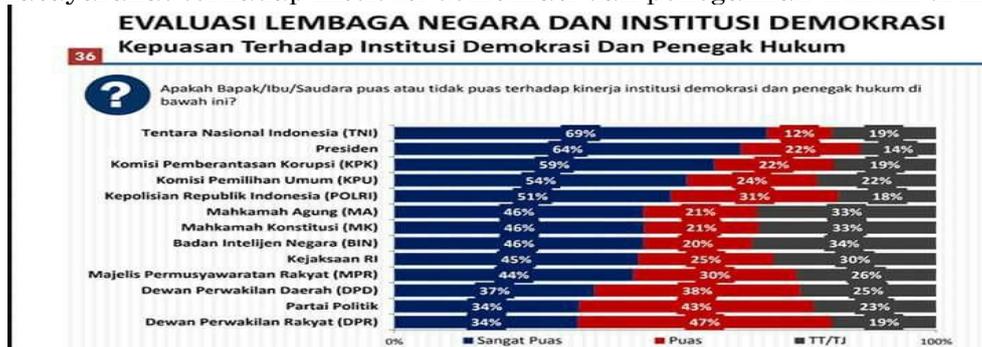
atau *Focus Group Discussion* merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 2007). Henning dan Columbia (1990) menjelaskan bahwa diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.

Menurut Andi Prastowo (2008) Diskusi Kelompok Terarah merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang dimintai pendapatnya mengenai suatu produk, konsep, layanan, ide, iklan, kemasan / situasi kondisi tertentu. Tujuan dari Diskusi Kelompok Terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik khususnya hak politik bagi penyandang disabilitas. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Setelah proses FGD selesai selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan workshop/ pelatihan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan bimbingan. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan materi terkait pendidikan politik, selanjutnya bagaimana metode sederhana dalam mengidentifikasi pemimpin yang berkualitas. Metode diskusi akan dilakukan setelah pemateri selesai menyampaikan topiknya. Para peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan kembali merespon jawaban yang diberikan oleh pembicara. Hal ini dilakukan agar peserta benar-benar dapat memahami apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang berdaya guna. Selanjutnya metode bimbingan dilakukan dengan cara memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membuka ruang partisipasi mulai dari sebelum pengabdian, masuk tahapan pengabdian dan setelah tahapan pengabdian berlangsung. Diharapkan warga masyarakat Muara Fajar Barat mampu memahami dan membudayakan untuk berpartisipasi secara etik. Untuk itu, tim pengabdian menyediakan layanan *call center* sebagai tempat pengaduan masyarakat terkait dengan pilgubri 2018.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam setiap helatan demokrasi lokal di Riau. Selanjutnya data survey Syaiful Mujani Research Concultan (SMRC) menunjukkan angka rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan penegak hukum. preferensi politik masyarakat masih memilih karena diimingi sesuatu apakah uang, sembako dsb. Untuk itu kami sebagai pelaksana pengabdian selalu mengingatkan akan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Riau yang berkeadilan menuju Indonesia yang bermartabat.

Berikut data terkait survey SMRC yang memperlihatkan grafik tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap institusi demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia.



Gambar 1. Hasil Survey SMRC 2017

Data di atas kita informasikan kepada masyarakat khususnya Ibu PKK Muara Fajar Barat, sehingga dapat menstimulus mereka untuk mau berpartisipasi secara aktif dan menjadi bagian pengawal demokrasi. Karena data tersebut mendeskripsikan bahwa masyarakat mulai tidak percaya dengan pemerintahnya jika ini berlangsung terus menerus maka ketidakstabilan politik akan terjadi dan mengancam ketahanan nasional Indonesia.

Tentunya kegiatan pengabdian ini dilakukan agar peserta benar-benar dapat memahami apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan terwujudnya kualitas pemimpin masyarakat yang berdaya guna. Output yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah terciptanya ketahanan masyarakat daerah dalam politik yang etik. Artinya bagaimana dalam jangka waktu yang panjang semangat lokal mampu merekat praktik demokrasi nasional.

Pemetaan Pengetahuan Masyarakat

Pemilihan kepala daerah atau yang kita kenal dengan sebutan pilkada adalah bentuk pelaksanaan demokrasi di aras lokal. Konsep bernegara itu adalah ada penyerahan sebagian kewenangan dan keinginan kita yang diserahkan sebagian kecil orang untuk menentukan kehidupan secara bersama. Maka dari itu pelaksanaan penyerahan kewenangan bersifat periodik dan lima tahunan. Selanjutnya segala tuntutan dan dukungan kita dikendalikan oleh “kepala daerah (GUBERNUR)” untuk menentukan kehidupan sehari-hari melalui kebijakan yang di ambilnya. Kepala daerah itu yang akan jadi pemimpin kita, oleh karenanya perlu kita mengetahui calon gubernur semenjak dini atau dari proses awalnya.

Untuk itu perlu mengetahui pengetahuan peserta, maka pelaksana pengabdian melakukan uji kuisisioner dengan 20 peserta baik sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Hasil Pengolahan Kuisisioner

No	Pertanyaan	Jawaban	Persentase Jawaban Sebelum Kegiatan (Pre Test)	Persentase Jawaban Sesudah Kegiatan (Post Test)
1.	Apakah ibu selalu memperhatikan perkembangan pilgubri yang dilaksanakan 20 juni 2018	a. Ya, selalu	51,1%	80%
		b. Ya, Sering	0%	5%
		c. Ya, kadang-kadang	15,5%	5%
		d. Ya, Tidak pernah	33,3%	10%
2.	Apakah ibu mengetahui siapa saja yang akan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Riau 2018	a. Ya, sangat tahu	16,6%	60%
		b. Ya, Sedikit tahu	50%	15%
		c. Ya, ragu-ragu	16,6%	15%
		d. Ya, Tidak	16,6%	10%

Dari hasil kuisioner diatas, dapat dipetakan bahwasanya pengetahuan masyarakat sebelum kegiatan pengabdian masih relatif minim terkait partisipasi politik dab calon pilgubri 2018, maka setelah kegiatan dilaksanakan pengetahuan masyarakat meningkat signifikan bahkan mulai mengetahui nama-nama calon pilgubri yang akan berkompetisi. Oleh karena itu, perlu menjaga komitmen peserta untuk tetap menggunakan hak suara dalam pilkada 2018 nantinya. Maka kita pelaksana pengabdiam mencoba mengedukasi peserta dengan memperlihatkan berbagai dampaknya, serta melakukan layanan berbasis *call center*. Layanan ini bersifat berkelanjutan (simultan), dimana layanan ini langsung dikelola oleh tim.

Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Politik dan Civic Culture

Pada prinsipnya kesadaran masyarakat terhadap politik hanya pada saat adanya momentum politik seperti Pemilu, Pilkada Propinsi/ Kabupaten yang sifatnya prosedural. Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini mengarahkan masyarakat kepada pengetahuan politik yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga berpolitik tidak hanya pada momentum tetapi kapanpun bisa berpolitik untuk kemaslahatan atau kepentingan bersama demi kedaulatan bangsa. Hal ini dapat berimplikasi terhadap lahirnya pemimpin yang berkualitas.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya Ibu PKK adalah dengan mendekati nilai-nilai politik etik yang substansial melalui pendidikan politik yang terarah dengan konsep atraktif dan dialogis. Artinya, mendekati pada situasi dan kondisi bagaimana pelaksanaan politik dapat menumbuhkan semangat kebangsaan bukan justru sebaliknya menimbulkan perpecahan. Maka dari itu, pilkada Provinsi Riau tahun 2018 dapat menjadi ukuran partisipasi masyarakat Muara Fajar Barat dalam berpolitik.

Dalam kegiatan pengabdian terlihat optimisme masyarakat khususnya Ibu PKK yaitu munculnya rasa tanggung jawab dalam mengkampanyekan gerakan pemilih pintar menuju Riau sejahtera. Ibu PKK dalam hal ini juga diberikan pemahaman tentang bagaimana trik dan cara memilih pemimpin yang berkualitas. Selanjutnya Ibu PKK diberikan pendampingan selama tahapan pilgubri 2018 melalui media center LPPM Unilak dan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Muara Fajar Barat tentang politik khususnya terkait partisipasi yang sebelumnya sangat minim pasca kegiatan meningkat. Untuk selanjutnya, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin karena menyangkut kehidupan atau kesejahteraan lima tahun kedepan. Selama ini pendidikan politik yang dilakukan partai politik belum efektif karena partai hadir sewaktu pilkada saja.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang ingin disampaikan diantaranya sebagai berikut Sosialisasi pendidikan politik yang berintegritas perlu ditingkatkan melalui pendekatan pelatihan dan bimbingan dengan melibatkan kolaborasi berbagai unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Masyarakat harus selalu terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya masalah politik dan budaya kewargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gede Purnama Putra. 2009. *Meretes Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung*. Jakarta: Gava Media.
- Abdilah S Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatera.
- Agustino, Leo, *Pilkada Langsung: Beberapa Catatan Kritis Dalam Jurnal Analisis CSIS* Vol. 43 no 2 Juni 2005, Jakarta, 2005.
- Bahar, Safaruddin, dkk. (Ed). 1996. *Integrasi Nasional, Teori, Masalah, dan Strategi*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Pustaka Gramedia.
- Cliford, Geertz. 2009. *The Interpretation Of Culture*. Dalam sebuah jurnal penelitian politik Vol.6, No.1, 2009 Kisruh Pemilu. Jakarta. LIPI Press.
- Isaac, Harold R. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis, Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik*. Terjemahan Canisyus Maran. Jakarta: YOI.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Prihatmoko J, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*. LP3M. Universitas Wahid Hasyim.
- Rihadmaji, Dodi. 2003. *Merintis Pemikiran Pemilu Kada Secara Langsung*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed) *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarundajang. 2005. *Pemilu Kada Langsung Problem dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Setyanto, P Widya. 2009. *Politik Identitas: Agama, Etnisitas, Dan Ruang/Space Dalam Dinamika Politik Di Indonesia*. Peresmian Cinta Kemanusiaan (Percik): Yogyakarta.
- Susan, Novri M.A. 2010. *Pengantar Sosiologi konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thimothy D. Sisk. 2001. *Democracy at The Local Level The Internatinal IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Management, and Governance*, Sweden: International IDEA.
- Tirtosudarno, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia (Demografi-Politik Pasca Soeharto)*. Jakarta: LIPI Press.

- Yandra, A. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*, 9(2), 62-74.
- Yandra, A. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 48-58
- Yandra, A. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada. *POLITIK*, 13 (1).
- Waisale, Yamin. 2010. *Dengung Pemilu Kada 2010: Merasa Benar di Jalan Yang sesat*. Jakarta: PT. Semarak Tata Warna.
- Widjojo, Muridan S. 2007. *Nasionalisme dan Etnisitas, dalam* Firman Noer, (Ed). Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme. Jakarta: Pusat Politik LIPI.